

ABSTRAK

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DAERAH PESISIR DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

Ario Budi Prasetyo

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas laut yang sangat berpotensi sebagai destinasi pariwisata. Untuk mengelolah kawasan tersebut maka dibentuknya dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat. Mengingat kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), maka ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Belum adanya Perda tetap yang mengatur tentang Kepariwisataaan, maka kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan Perda Provinsi Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisataaan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :(1). Bagaimana peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat?(2). Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di kabupaten Pesisir Barat?

Dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir adalah :(1). Kepala dinas pariwisata bertugas membimbing menyusun rencana kerja Dinas Pariwisata, mengkoordinir kerja bawahan, membina bawahannya, dan mengevaluasi kerja bawahannya.(2). Kepala dinas pariwisata didukung perangkat pemerintahan dibidang pariwisata untuk menjalankan program kerja dinas pariwisata.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan pariwisata adalah : (1) Belum adanya peraturan daerah tentang kepariwisataaan yang terbentuk mengakibatkan pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala.(2). Masih kurangnya fasilitas penunjang seperti: listrik dan air bersih.

Dengan demikian disarankan :(1). Diharapkan agar segera memperbaiki dan menambah semua fasilitas yang mendukung agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.(2). Hendaknya segera dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kepariwisata agar program kerja dinas pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan.

Kata Kunci : Pariwisata, Pesisir, Pesisir Barat